

# Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia

Wifa Afrida Jumiati<sup>1</sup>, Yeniwati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Korespondensi: [wifaafriada0404@gmail.com](mailto:wifaafriada0404@gmail.com), [yeniwati.unp@gmail.com](mailto:yeniwati.unp@gmail.com)

---

## Info Artikel

### Diterima:

20 Agustus 2025

### Disetujui:

20 Agustus 2025

### Terbit daring:

20 Agustus 2025

DOI: -

## Sitasi:

Jumiati, W.A. & Yeniwati. (2025). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia

## Abstract:

*This research examines how gender disparities in health, education, and consumption allocation influence inclusive economic development in Indonesia. Using provincial panel data spanning 2013 to 2023 and employing a fixed effects regression approach, the study finds that all measures of gender inequality have a positive and statistically significant impact on the Inclusive Economic Development Index (IPEI). The results suggest that narrowing gender gaps particularly in education, healthcare access, and consumption distribution plays a crucial role in promoting inclusive economic growth. These findings align with Human Capital Theory and the inclusive development framework, which highlight that sustainable economic progress depends on equitable opportunities and active gender inclusive participation.*

**Keyword :** *Inclusive economic development, Gender Health inequality, Gender Education inequality, Gender konsumsi inequality.*

## Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesenjangan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan distribusi konsumsi memengaruhi pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Dengan menggunakan data panel provinsi dari tahun 2013 hingga 2023 dan menerapkan pendekatan regresi efek tetap, studi ini menemukan bahwa seluruh indikator ketimpangan gender memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Hasil ini menunjukkan bahwa memperkecil kesenjangan gender khususnya dalam pendidikan, kesehatan, dan distribusi konsumsi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Temuan ini sejalan dengan teori modal manusia dan kerangka pembangunan inklusif, yang menekankan bahwa kemajuan ekonomi yang berkelanjutan bergantung pada kesempatan yang adil dan partisipasi yang inklusif secara gender.

**Kata Kunci :** pembangunan ekonomi inklusif, ketimpangan gender pada kesehatan, ketimpangan gender pada pendidikan, ketimpangan gender pada konsumsi.

Kode Klasifikasi JEL:

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan peranan penting dan seharusnya menjadi prioritas bagi setiap negara. Pembangunan nasional bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh penduduk. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata. Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan ekonomi merupakan kajian kompleks yang membahas berbagai dimensi sosial dan kelembagaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan kesenjangan, serta upaya mengatasi kemiskinan.

Menurut Klasen (2010), pembangunan inklusif merupakan suatu proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat secara adil. Bappenas mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai proses pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan akses serta peluang yang merata bagi semua masyarakat secara adil dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar kelompok sosial maupun wilayah geografis. Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, pemerintah Indonesia melalui Bappenas

merilis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) pada tahun 2019. Indeks ini dirancang sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pembangunan di Indonesia telah bersifat inklusif.

**Tabel 1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Nama Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	4,68	4,78	4,87	5,38	5,56	5,53	5,74	5,46	5,73	5,88	6,02
Sumatera Utara	5,42	5,69	5,82	5,99	6,12	6,07	6,34	5,95	6,34	6,60	6,67
Sumatera Barat	5,31	5,47	5,72	6,00	5,98	5,93	6,15	5,67	6,17	6,38	6,45
Riau	5,05	5,16	5,21	5,50	5,66	5,70	5,86	5,67	6,19	6,32	6,46
Jambi	5,12	5,17	5,21	5,40	5,51	5,64	5,76	5,43	5,87	6,02	6,03
Sumatera Selatan	5,02	5,05	5,38	5,67	5,83	5,70	5,87	5,55	5,97	6,14	6,31
Bengkulu	4,97	5,21	5,30	5,51	5,54	5,51	5,75	5,52	5,95	6,12	6,19
Lampung	5,03	5,13	5,26	5,44	5,64	5,59	5,84	5,48	5,95	6,11	6,24
Bangka Belitung	5,59	5,67	5,96	6,24	6,20	6,18	6,23	5,83	6,49	6,75	7,00
Kepulauan Riau	6,02	5,96	6,35	6,36	6,34	6,44	6,58	6,18	6,66	6,75	6,95
<b>DKI Jakarta</b>	<b>6,56</b>	<b>6,71</b>	<b>7,00</b>	<b>7,26</b>	<b>7,36</b>	<b>7,66</b>	<b>7,88</b>	<b>7,19</b>	<b>7,79</b>	<b>7,93</b>	<b>7,94</b>
Jawa Barat	5,28	5,45	5,69	5,89	5,96	6,03	6,18	5,63	6,02	6,27	6,22
Jawa Tengah	5,60	5,77	5,95	6,14	6,34	6,26	6,51	6,01	6,43	6,58	6,64
DI Yogyakarta	6,08	6,20	6,22	6,39	6,50	6,50	6,69	6,13	6,63	6,63	6,71
Jawa Timur	5,59	5,73	5,73	5,99	6,11	6,13	6,37	5,93	6,31	6,47	6,52
Banten	5,16	5,19	5,34	5,57	5,59	5,60	5,95	5,48	6,09	6,31	6,39
Bali	6,20	6,29	6,54	6,75	6,54	6,64	6,82	5,60	6,23	6,82	7,04
Nusa Tenggara Barat	4,87	4,98	5,73	5,57	5,32	5,04	6,00	5,71	6,06	6,30	6,19
Nusa Tenggara Timur	4,06	4,24	4,26	4,57	4,80	4,82	4,97	4,65	5,24	5,48	5,63
Kalimantan Barat	4,66	4,78	4,96	5,22	5,18	5,31	5,55	5,27	5,79	5,96	5,99
Kalimantan Tengah	5,03	5,17	5,51	5,63	5,82	5,74	5,97	5,59	6,12	6,30	6,41
Kalimantan Selatan	5,33	5,47	5,67	5,97	6,01	5,92	6,14	5,75	6,24	6,32	6,49
Kalimantan Timur	5,54	5,33	5,72	5,85	6,04	5,96	6,22	5,77	6,24	6,47	6,79
Kalimantan Utara	5,26	5,37	5,45	5,67	5,88	6,04	6,17	5,55	6,22	6,37	6,54
Sulawesi Utara	5,17	5,32	5,58	5,74	5,83	5,78	6,16	5,65	6,15	6,45	6,41
Sulawesi Tengah	4,76	4,77	5,36	5,41	5,44	5,38	5,72	5,86	6,41	6,77	6,81
Sulawesi Selatan	5,13	5,32	5,42	5,57	5,73	5,77	6,04	5,56	6,11	6,34	6,31
Sulawesi Tenggara	4,86	4,95	5,23	5,55	5,64	5,53	5,81	5,50	6,02	6,19	6,33

Gorontalo	4,45	4,69	4,80	5,19	5,15	5,26	5,57	5,25	5,61	5,70	5,75
Sulawesi Barat	4,49	4,77	4,82	5,14	5,17	5,12	5,43	4,99	5,67	5,70	6,06
Maluku	4,25	4,57	4,76	5,02	5,13	5,12	5,44	5,09	5,63	5,85	5,95
Maluku Utara	4,62	4,66	4,93	5,25	5,28	5,29	5,42	5,42	6,30	6,78	6,82
Papua Barat	4,12	4,27	4,52	4,84	4,91	5,18	5,32	5,01	5,19	5,47	5,84
<b>Papua</b>	<b>2,60</b>	<b>2,78</b>	<b>3,03</b>	<b>3,33</b>	<b>3,44</b>	<b>3,66</b>	<b>3,22</b>	<b>3,58</b>	<b>4,14</b>	<b>3,84</b>	<b>4,04</b>
<b>Indonesia</b>	5,11	5,24	5,42	5,66	5,76	5,77	5,97	5,54	6,00	6,13	6,17

Sumber: BAPPENAS, 2023

Pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia selama periode 2013–2023, capaian pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia menunjukkan fluktuasi antarprovinsi. Sebanyak 17 provinsi, mayoritas berada di wilayah barat dan tengah, mencatat tingkat inklusivitas di atas rata-rata nasional. Provinsi tersebut antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara 17 provinsi lainnya berada di bawah rata-rata nasional, didominasi wilayah timur seperti Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kondisi ini menandakan adanya kemajuan pemerataan ekonomi, meskipun tantangan berupa ketimpangan wilayah dan disparitas pendapatan masih menjadi hambatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi, meski tantangan seperti ketimpangan wilayah dan disparitas pendapatan masih menghambat tercapainya inklusivitas penuh.

Provinsi dengan capaian tertinggi adalah DKI Jakarta, yang setiap tahun mencatat nilai inklusivitas di atas provinsi lain dan berada pada kategori memuaskan, mulai dari 6,56 (2013) hingga 7,94 (2023). Keberhasilan ini didukung oleh potensi sumber daya besar, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan pemerataan pembangunan. Sebaliknya, Papua memiliki tingkat inklusivitas terendah dengan rata-rata 3,42 per tahun, meski mengalami peningkatan dari 2,60 (2013) menjadi 4,04 (2023). Capaian ini masih berada pada kategori tidak memuaskan, yang mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan tingginya ketimpangan sosial-ekonomi. Kondisi tersebut menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah dengan capaian rendah.

Salah satu isu yang turut memengaruhi capaian pembangunan inklusif adalah ketimpangan gender, yang masih menjadi tantangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini bertujuan memasukkan perspektif gender dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Namun, praktik diskriminasi berbasis gender masih terjadi di berbagai bidang.

Mengacu pada situs resmi Badan Pusat Statistik (2017), keluhan kesehatan diartikan sebagai gangguan pada kondisi fisik seperti sesak napas, demam, diare, sakit kepala, serta penyakit akut dan *kronis* maupun gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, rasa takut, trauma,

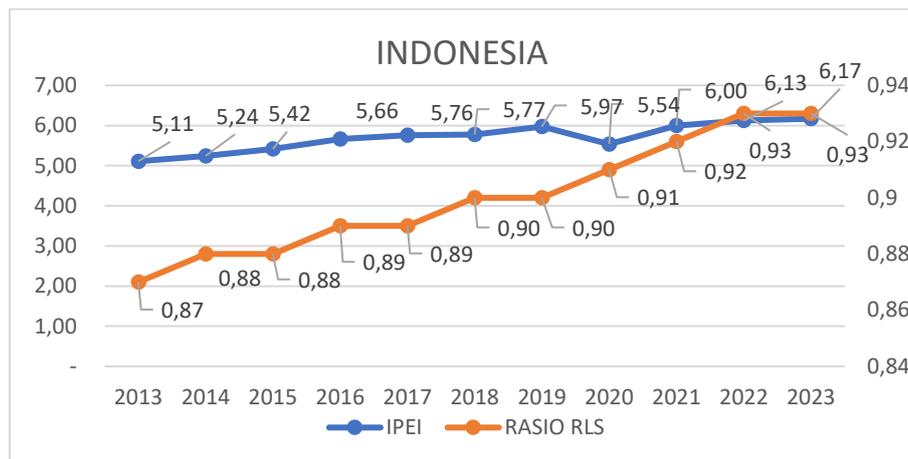
hingga *skizofrenia*. Keluhan ini juga mencakup gangguan akibat kecelakaan atau faktor lain yang menghambat aktivitas harian, dan dilaporkan kepada fasilitas layanan kesehatan. Informasi mengenai keluhan kesehatan memiliki peran penting dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Data ini menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan strategis dalam pengembangan layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, guna menjamin terpenuhinya standar kesehatan yang ideal bagi perempuan dan laki-laki. Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah memanfaatkan data keluhan kesehatan sebagai indikator untuk mengidentifikasi ketimpangan gender dalam sektor kesehatan (Fajriyah dan Budiantara, 2015; Lukiswati, Djuraidah, dan Syafitri, 2019; KPPPA, 2020).



Sumber: Data diolah, BPS, 2025

Rasio Keluhan Kesehatan (KS) perempuan/laki-laki di Indonesia berfluktuasi pada 2013–2023. Rasio >1 menunjukkan keluhan lebih tinggi pada perempuan, mencerminkan ketimpangan akses, layanan, atau kondisi kesehatan gender. Sepanjang periode tersebut, perempuan konsisten melaporkan keluhan lebih banyak, dari 1,05 pada 2013, naik hingga puncak 1,144 pada 2022, lalu sedikit turun ke 1,13 pada 2023. Nilai terendah tercatat pada 2014 (1,05) dengan IPEI 5,24. Rasio mendekati 1 menandakan kesenjangan relatif kecil, namun tetap menunjukkan bahwa kesetaraan kesehatan gender belum sepenuhnya tercapai meski pembangunan ekonomi inklusif meningkat.

Rasio Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) perempuan terhadap laki-laki mendeskripsikan sejauh mana kesetaraan gender dalam akses pendidikan. Penurunan rasio rata-rata lama sekolah mencerminkan terdapat hambatan pencapaian sekolah oleh perempuan yang pada mencerminkan meningkatnya ketimpangan gender. Sebaliknya, peningkatan rasio rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan kesetaraan pendidikan antar gender yang dicapai. Ketika ketimpangan gender memburuk, hal ini berpotensi menurunkan nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), sehingga mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi belum berlangsung secara inklusif. Oleh karena itu, RRLS dapat dijadikan indikator untuk menilai ketimpangan gender di sektor pendidikan, di mana peningkatan rasio ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

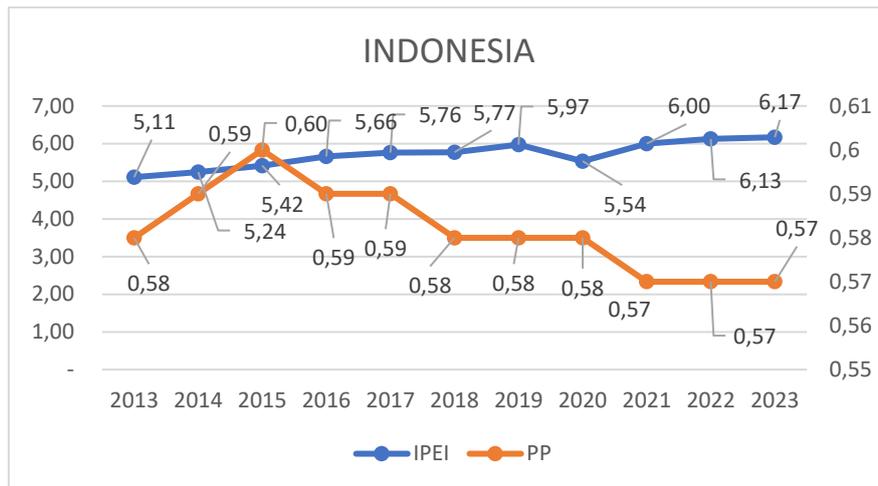


Sumber: Data diolah, BPS, 2025

Rasio Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) di Indonesia meningkat setiap tahun, menunjukkan kesenjangan pendidikan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil. Pada tahun 2023 sebesar 0,93 dengan IPEI 6,17 (kategori memuaskan), menandakan kesetaraan gender hampir tercapai dan sejalan dengan pembangunan inklusif. Nilai terendah tercatat pada 2018 sebesar 0,90 dengan IPEI 5,77. Namun, pada 2020 muncul permasalahan, dimana RRLS naik, tetapi IPEI justru turun, bertolak belakang dengan teori sehingga menjadi fokus penelitian ini.

Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam pendidikan dapat menghambat peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ketika produktivitas angkatan kerja menurun, hal ini berdampak langsung pada lambatnya laju pembangunan nasional. Ketimpangan gender di sektor ketenagakerjaan turut berkontribusi terhadap penurunan partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan, terutama karena adanya kesenjangan upah yang dialami perempuan (Pervaiz et al., 2012). Ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada struktur tenaga kerja, tetapi juga tercermin dalam perbedaan pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan formal cenderung memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah, yang pada akhirnya membuat tingkat pengeluaran per kapitanya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kondisi ini memengaruhi tingkat kesejahteraan individu secara umum, memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi antar gender, serta menghambat terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah, karena mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat berdasarkan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) (Yunita, 2012). Peningkatan pengeluaran per kapita dapat menjadi bagian dari strategi untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif. Indikator ini secara langsung mencerminkan hasil dari proses pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pengeluaran per kapita digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat serta sebagai cerminan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif, indikator ini tidak hanya menggambarkan perilaku konsumsi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana hasil pembangunan didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.



Sumber: Data diolah, BPS, 2025

Secara nasional, rasio pengeluaran per kapita perempuan terhadap laki-laki hanya sekitar 0,58, menunjukkan dominasi laki-laki dalam aktivitas ekonomi. Pada tahun 2015, RPP tertinggi sebesar 0,60 yang berarti pengeluaran perkapita perempuan hanya 60% dari pengeluaran laki-laki 100%, hal ini masih jauh dari kesetaraan gender, diiringi dengan IPEI sebesar 5,42 yang masuk kedalam kategori memuaskan. RPP terendah terjadi pada tahun, 2021, 2022 dan 2023 sebesar 0,5, hal ini memperburuk ketimpangan gender pada konsumsi. Pada data RPP dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender pada sektor ekonomi masih cukup tinggi. Dimana pengeluaran perkapita perempuan jauh dibawah pengeluaran perkapita laki-laki. Pada tahun 2017, 2020 dan 2021 terdapat permasalahan. Dimana saat Rasio Pengeluaran Perkapita mengalami penurunan justru pembangunan ekonomi inklusif mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya, hal ini bertolak belakang dengan teori yang berlaku sehingga munculah sebuah fenomena yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara kesetaraan gender di berbagai sektor dengan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi hal yang krusial dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian dengan judul “Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia” dipandang relevan dan penting untuk dilakukan.

### Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pendekatan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan kesetaraan kesempatan, termasuk pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat lokal, dan kelompok *marginal*. Bappenas (2019) mendefinisikannya sebagai pertumbuhan ekonomi yang memberikan akses dan peluang seluas-luasnya secara adil, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Selain itu, pembangunan ekonomi inklusif menekankan pengelolaan sumber daya yang bijak dan berkelanjutan, serta memastikan kelompok rentan dapat berpartisipasi dan memanfaatkan peluang yang tersedia (Sitorus & Arasani, 2016).

Secara struktural, IPEI terdiri dari 3 pilar, 8 subpilar, dan 21 indikator. Pilar pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar kedua berfokus pada pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pilar ketiga menyoroti aspek perluasan akses dan kesempatan. Untuk menilai tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi, Indonesia mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat inklusivitas pembangunan di Indonesia dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan dan kemiskinan, serta ketersediaan akses dan kesempatan (Bappenas, 2019). Penilaian IPEI diberikan dalam skala 1 hingga 10. Skor 1–3 dikategorikan sebagai “tidak memuaskan,” Skor 4–7 termasuk kategori “memuaskan,” Sedangkan skor 8–10 masuk dalam kategori “sangat memuaskan,” yang mencerminkan pencapaian pembangunan ekonomi yang tinggi, dengan distribusi manfaat yang merata serta keterjangkauan akses ekonomi bagi hampir seluruh masyarakat.

### **Ketimpangan gender**

Ketimpangan gender (*gender inequality*) menggambarkan kondisi ketika terdapat perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga salah satu pihak mengalami kerugian atau keterbatasan kesempatan. Situasi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun pengambilan keputusan. Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia menerapkan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), yang berupaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan—mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Tujuan utama PUG adalah mewujudkan kesetaraan gender, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh semua penduduk tanpa memandang jenis kelamin.

Kesetaraan ini diukur melalui berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mengendalikan sumber daya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan menerima hasil pembangunan secara proporsional (RPJMN 2020–2024).

Secara kuantitatif, ketimpangan gender dapat diukur menggunakan Indeks Paritas Gender (IPG), yang dihitung sebagai perbandingan capaian perempuan terhadap capaian laki-laki. Menurut Sari (2019), formula pengukurannya adalah:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Capaian Perempuan}}{\text{Capaian Laki-laki}}$$

Rasio = 1 kinerja perempuan dan laki-laki setara

Rasio < 1 kinerja perempuan lebih rendah

Rasio > 1 kinerja perempuan lebih tinggi.

### **Teori Human Capital**

Teori Modal Manusia merupakan suatu bentuk modal investasi terhadap manusia sebagai modal yang nilainya dapat ditingkatkan melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan, sehingga mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Schultz & Becker, 1961). Konsep ini mencakup kemampuan individu seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kesehatan; hasil akumulasi pendidikan dan pelatihan; serta sumber utama produktivitas yang dihasilkan dari investasi dalam keterampilan, kebiasaan, energi, dan inisiatif (Rosen, 1999). Teori Investasi Modal Manusia menegaskan bahwa investasi pendidikan dan kesehatan, meskipun memerlukan pengorbanan finansial, bertujuan untuk memperoleh pendapatan dan konsumsi lebih tinggi di masa depan, di mana pendidikan meningkatkan keterampilan dan kesehatan memastikan produktivitas optimal, keduanya saling memperkuat (Nurkholis A., 2018).

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai laporan resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan disusun dalam format data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* selama periode sebelas tahun, dari 2013 hingga 2023, dan data *cross section* yang mencakup 34 Provinsi di Indonesia. Melalui struktur data panel tersebut, penelitian ini berhasil menghimpun sebanyak 374 observasi. Integrasi antara dimensi waktu dan wilayah memberikan pijakan analitis yang lebih mendalam dalam mengkaji dinamika hubungan antar variabel yang diteliti, baik secara temporal maupun spasial.

Untuk menunjang analisis dan memperoleh solusi yang relevan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Proses ini mencakup penelusuran berbagai sumber literatur ilmiah yang tersedia di lingkungan Universitas Negeri Padang, meliputi buku, jurnal, laporan penelitian, serta referensi tertulis lainnya yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan landasan teori dan kerangka konseptual penelitian.

**Tabel 2 Definisi Operasional**

Variabel	Indikator	Satuan
Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks
Ketimpangan gender pada Kesehatan	Rasio keluhan Kesehatan perempuan/laki-laki	Persen
Ketimpangan gender pada Pendidikan	Rasio rata-rata lama sekolah perempuan/laki-laki	Persen
Ketimpangan gender pada konsumsi	Rasio pengeluaran perkapita perempuan/laki-laki	Persen

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi data panel untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pemilihan model yang tepat diperlukan untuk memperoleh estimasi parameter yang akurat, sehingga dilakukan serangkaian uji guna menentukan model regresi panel yang paling sesuai.

### Uji Chow

Uji *Chow* digunakan untuk memilih model yang paling tepat antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Apabila hasil uji menunjukkan nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka *Common Effect Model* dianggap lebih sesuai. Namun, jika nilai probabilitasnya  $< 0,05$ , maka *Fixed Effect Model* yang dipilih sebagai model terbaik untuk digunakan.

**Tabel 3 Uji Chow**

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	44.33	33, 334	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Data Stata, 2025

Dari hasil uji *chow* dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya sebesar  $0.0000 < 0,05$  yang artinya model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

### Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan pemilihan model yang paling sesuai antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas > dari 0,05, maka *Random Effect Model* dianggap lebih tepat digunakan. Namun, apabila nilai probabilitas < 0,05, maka *Fixed Effect Model* dipilih sebagai model yang paling sesuai untuk analisis.

**Tabel 4 Uji Hausman**

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-Sq. Df	Prob
Hausman Test	40.09	3	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Data Stata 14, 2025

Hasil uji *Hausman* menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan hasil pemilihan model, pendekatan yang paling tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Melalui model ini, diperoleh estimasi parameter dan interpretasi hasil yang menjadi landasan dalam penarikan kesimpulan penelitian.

**Tabel 5 Hasil Uji Fixed Effect Model**

Dependent Variable : IPEI	Prob> F	=	0.0000	
Method : Fixed Effect regression	F(3,333)	=	173.11	
Sample : 2013-2023	R-squared	=	0.6093	
Periode included : 11				
Cross-section included : 34				
Total Panel (balanced) observations : 371				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-11.55609***	1.061517	-10.89	0.000
GH	2.162545***	0.3776401	5.73	0.000
GE	13.8456***	0.8193069	16.90	0.000
GC	4.056825**	1.274711	3.18	0.002

Sumber: Hasil Olahan Data Stata 14, 2025

Berdasarkan Tabel 5 yang memuat hasil estimasi dari pengolahan data sekunder menggunakan perangkat lunak *Stata 14*, diperoleh bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPEI_{it} = -11.55486 + 2.16155GH_{it} + 13.84541GE_{it} + 4.057127GC_{it}$$

**Arah hubungan masing-masing variabel terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia**

Berdasarkan hasil persamaan regresi, rasio keluhan kesehatan perempuan terhadap laki-laki, rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki, serta rasio pengeluaran per kapita perempuan terhadap laki-laki secara keseluruhan menunjukkan pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar 0,6103 mengindikasikan bahwa ketiga variabel bebas, yakni GH (*Gender Health Inequality*), GE (*Gender Education Inequality*), dan GC (*Gender Consumption Inequality*), mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen sebesar 61,03%. Sementara itu, sebesar 38,97% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

Hipotesis pertama, *Gender Health Inequality* (GH) memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif pada periode 2013–2023, dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,16155. Artinya, setiap peningkatan GH sebesar 1% berpotensi mendorong peningkatan indeks pembangunan ekonomi inklusif sebesar 2,16%, dengan asumsi kondisi lainnya tetap (*ceteris paribus*). Walaupun rasio keluhan kesehatan perempuan terhadap laki-laki yang melebihi angka satu secara teoritis dapat mencerminkan adanya ketimpangan gender di bidang kesehatan, dalam konteks Indonesia angka ini justru mengindikasikan peningkatan kualitas pembangunan inklusif khususnya dari sisi partisipasi perempuan dan kemampuan sistem dalam merespons kebutuhan mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif sebagaimana dijelaskan oleh Bappenas (2019), yang menekankan bahwa pembangunan tidak hanya pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan. Tingginya partisipasi perempuan dalam menyampaikan keluhan kesehatan diartikan sebagai indikasi bahwa proses pembangunan telah menyentuh kelompok ini secara lebih partisipatif. Pembangunan inklusif sendiri merupakan pendekatan pembangunan yang menjamin bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, serta mendorong keterlibatan aktif semua kelompok sosial dalam proses tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori Modal Manusia dari Becker (1964), yang menyatakan bahwa investasi pada kesehatan manusia, termasuk pemerataan akses terhadap layanan kesehatan, akan meningkatkan produktivitas individu dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Schultz (2010) menyampaikan bahwa peningkatan harapan hidup, sebagai indikator dari perbaikan layanan kesehatan, merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tingginya tingkat pelaporan keluhan kesehatan oleh perempuan dapat dipandang sebagai sinyal bagi perlunya penguatan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender.

Hipotesis kedua, *Gender Education Inequality* (GE) juga menunjukkan pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif, dengan koefisien regresi sebesar 13,84541. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan GE sebesar 1% akan meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebesar 13,84%, dengan asumsi faktor lain tetap konstan. Hasil penelitian ini didukung teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang dikemukakan oleh Gary Becker dan Theodore Schultz. Peningkatan kualitas serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk upaya mengurangi ketimpangan gender di sektor pendidikan, merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mewujudkan pembangunan yang inklusif. Ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, maka potensi produktivitas nasional dapat dimaksimalkan. Mengurangi kesenjangan pendidikan antara gender tidak hanya meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran berbagai kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan menghapus kesenjangan gender. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan

Program Wajib Belajar 12 Tahun melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013 guna memperluas akses pendidikan menengah secara merata tanpa diskriminasi gender. Selain itu, Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menegaskan pentingnya penghapusan kesenjangan gender dalam pendidikan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin 4 dan 5. Program seperti Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut memberikan dukungan konkret dalam menjangkau kelompok rentan, termasuk anak perempuan dari keluarga prasejahtera. Kebijakan-kebijakan ini terbukti efektif dalam menekan kesenjangan pendidikan berbasis gender serta mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, yang pada akhirnya memperkuat arah pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

Hipotesis ketiga, *Gender consumption Inequality* (GC) memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif, yang tercermin dari koefisien regresi sebesar 4,057127. Dengan demikian, kenaikan GC sebesar 1% akan berimplikasi pada peningkatan IPEI sebesar 4,05%, dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel lainnya.

Temuan regresi ini sejalan dengan *Human Investment Theory* yang dikemukakan oleh Hanapih (2011), yang menyatakan bahwa investasi dalam sumber daya manusia merupakan bentuk pengorbanan yang dapat diukur secara finansial dengan tujuan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi di masa mendatang. Peningkatan penghasilan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas konsumsi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Konsep ini berkaitan erat dengan teori modal manusia (*human capital*), di mana investasi pada manusia, termasuk dalam bentuk konsumsi produktif, berperan penting dalam memperkuat pembangunan jangka panjang.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial yang secara langsung mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga miskin dan perempuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT), di mana sebagian besar penerima manfaatnya adalah perempuan baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai pengelola pengeluaran rumah tangga. Di samping itu, pendekatan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang tercantum dalam RPJMN 2020–2024 menempatkan kesetaraan gender sebagai prinsip utama dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, termasuk dalam sektor perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat.

Kebijakan-kebijakan tersebut telah berkontribusi secara nyata dalam memperkuat daya beli perempuan dan mendorong perbaikan rasio pengeluaran per kapita perempuan terhadap laki-laki (GC) ke arah yang lebih setara. Dengan demikian, strategi ini turut berperan dalam mengurangi ketimpangan gender dalam aspek konsumsi serta mempercepat tercapainya pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel yang dilakukan menggunakan Stata 14, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Rasio keluhan kesehatan perempuan terhadap laki-laki (GH) yang lebih tinggi mencerminkan tingginya partisipasi perempuan dalam sistem layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembangunan semakin responsif terhadap kelompok rentan. Temuan ini selaras dengan konsep pembangunan inklusif serta teori modal manusia yang dikemukakan oleh Becker dan Schultz, yang menekankan bahwa akses setara terhadap layanan kesehatan mampu meningkatkan produktivitas individu dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki (GE) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Hasil ini menguatkan pandangan Todaro dan teori human capital yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan terutama bagi perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas, serta pengurangan ketimpangan gender dalam jangka panjang.

Rasio pengeluaran per kapita perempuan terhadap laki-laki (GC) sebagai representasi akses terhadap konsumsi turut menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Walaupun ketimpangan dalam hal pengeluaran masih cukup besar secara absolut, peningkatan proporsi konsumsi perempuan di berbagai daerah berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Temuan ini mendukung teori human investment, yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi individu akan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi pembangunan.

Secara keseluruhan, ketimpangan gender di bidang kesehatan, pendidikan, dan konsumsi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan dalam aspek-aspek ketimpangan gender turut berkontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan secara ekonomi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (2023) *Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2013-2023*. Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/40/461/1/pengeluaran-per-kapita-yang-disesuaikan-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Badan Pusat Statistik (2023) *Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun), 2013-2023*. Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/40/459/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Fajriyyah, N., & Budiantara, I. N. (2015). Pemodelan indeks pembangunan gender dengan pendekatan regresi nonparametrik spline di Indonesia. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 4(2), 2337-3520.
- Hanapiah, Ali. 2011. Analisis Investasi Modal Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Dan Pelatihan. Jatinagor: IPDN.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2023). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif/Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan <https://inklusif.bappenas.go.id/>
- Klasen, Stephen. 2010. *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*. ADB Sustainable Development Working Paper Series
- Lukiswati, I., Djuraidah, A., & Syafitri, UD (2020). Analisis Regresi Data Panel pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah Tahun 2011-2015. *Jurnal Statistika Indonesia dan Penerapannya*, 4(1), 89–96.
- KPPPA. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*
- Nurkholis, A. (2018). *Teori pembangunan sumberdaya manusia: Human capital theory, human investment theory, human development theory, sustainable development theory, people centered development theory* (No. 8trv7\_v1). Center for Open Science.
- Pervaiz, Z., Irfan, M., Ahmad, S., Irfan Chani, M., Ahmad Jan, S., & Chaudhary, AR (2012). Ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi: analisis deret waktu untuk Pakistan. 37176.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American economic review*, 51(1), 1-17.
- Sitorus, AV (2016). Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (The impact of gender inequality in economic growth in Indonesia). *Sosio Informa*, 2, 89–101.

Todaro & Smith (2015) menyatakan bahwa peningkatan pendidikan perempuan tak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas dan penghasilan mereka di dunia kerja, tetapi juga

Yunita Mahrany. 2012. Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. Skripsi : Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanudin, Makassar